

LAPORAN KINERJA



DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2017





TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2017

Pengarah:

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Penanggung Jawab:

Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Editor:

Sumiati

Penulis:

Prasetyo Hadi

Dewi Yuliana Lestari

Lukman Hakim

Grafis:

Alfi Sahrin

Supriyanto

Diterbitkan oleh:

Bagian Penyusunan Program & Pelaporan Setditjen Informasi dan Komunikasi Publik

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Tahun 2018



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2017

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Kedudukan, Tugas, Fungsi	1
B.	Struktur Organisasi	2
C.	Aspek Strategis	4
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	9
A.	Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019	10
B.	Perjanjian Kinerja 2017	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	18
A.	Capaian Renstra 2017	18
B.	Kinerja Eselon I Tahun 2017	20
C.	Kinerja Eselon II Tahun 2017	23
1.	Kinerja Direktorat Komunikasi Publik	23
2.	Kinerja Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi	27
3.	Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Publik	29
4.	Kinerja Direktorat Kemitraan Komunikasi	30
5.	Kinerja Direktorat Layanan Informasi Internasional	32
6.	Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal IKP	33
BAB IV	PENUTUP	35
A.	Kesimpulan	35
B.	Saran	35
Lampiran Realisasi Keuangan 2017		36
Lampiran Hasil Survei Online Akses Informasi Publik tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah		37

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) No. 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, kedudukan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Direktur Jenderal.

2. Tugas

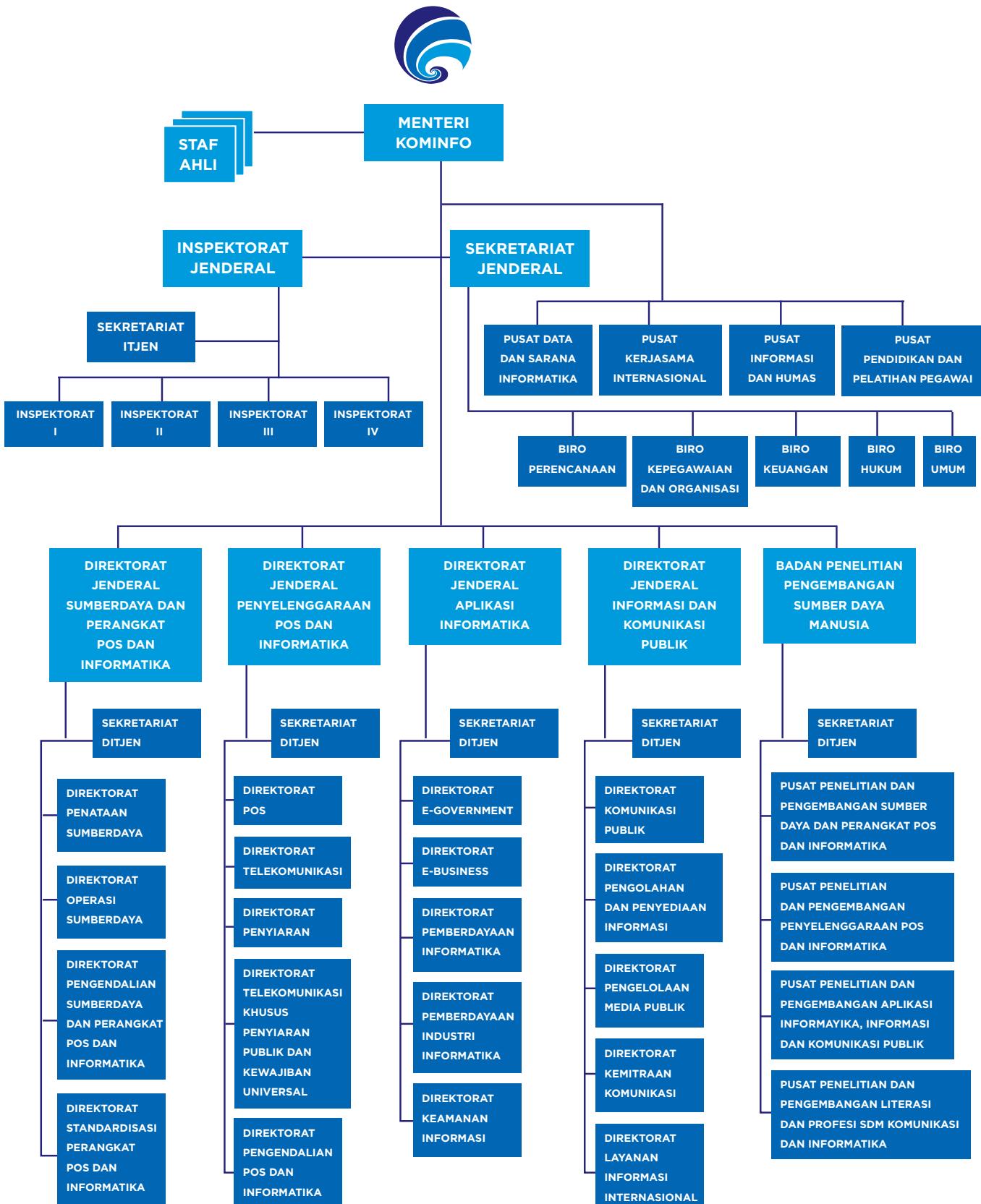
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik sebagai salah satu unit kerja di lingkup Kemenkominfo memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan seluruh kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi adalah:

1. Perumusan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

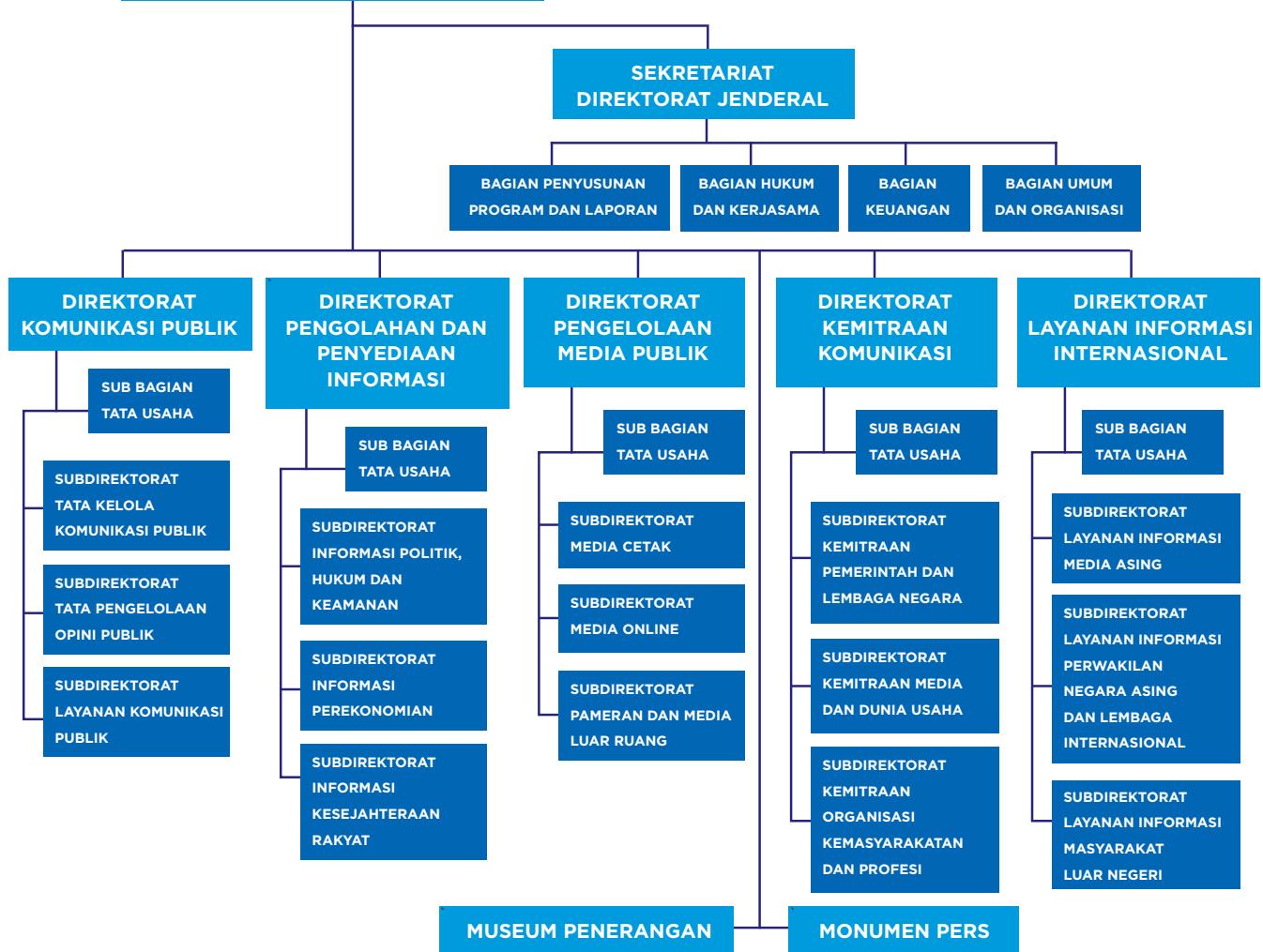
B. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1.1
Organisasi Kemenkominfo



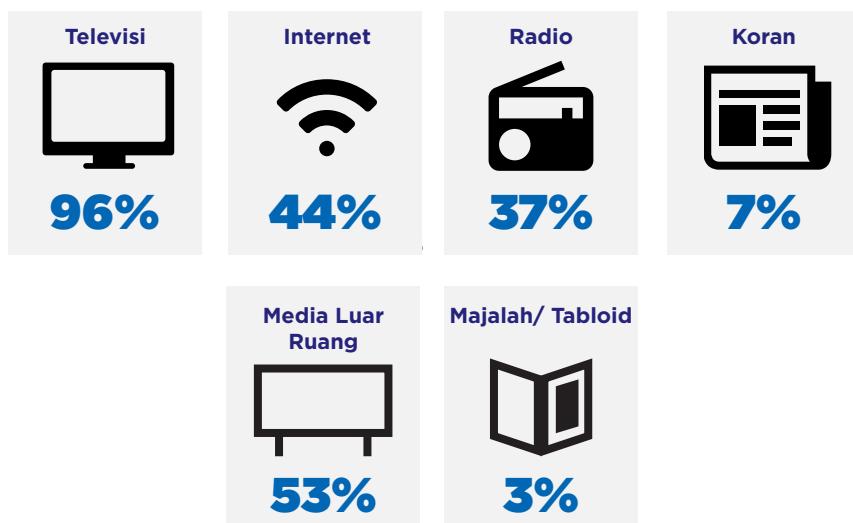
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



Gambar 1.2
**Struktur Organisasi Direktorat Jenderal
Informasi dan Komunikasi Publik**

C. ASPEK STRATEGIS

Salah satu agenda pembangunan nasional berdasarkan Nawacita adalah meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik, dengan meningkatkan keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik dan meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dalam hal ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) memiliki fungsi sebagai komunikator Pemerintah. Fungsi ini diturunkan dari UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian Direktorat Jenderal (Ditjen) IKP berperan memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 250 juta jiwa mendapatkan akses terhadap informasi publik.



Gambar 2. Penetrasi media di Indonesia berdasarkan survei Nielsen

Berdasarkan Survey Nielsen Consumer Media Tahun 2017, masyarakat Indonesia mendapatkan informasi dengan berbagai cara. Sebagian besar mendapatkan informasi melalui media televisi (96%). Selain itu, melalui internet (44%), radio (37%), koran (7%), dan Tabloid/Majalah (3%). Namun demikian, penyebaran informasi saat ini masih dianggap kurang efektif, karena belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh karena masih belum meratanya akses terhadap media dan ketersediaan konten informasi publik. Sebagai contoh, berdasarkan hasil Pemetaan Profil Target Audiens, Media, Program Prioritas dan Kebijakan Pemerintah Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2017, masyarakat di Kepulauan Talaud memiliki akses terhadap televisi (57,1%) dan telepon selular (46,7%) yang sebagian besar adalah nelayan. Namun demikian, televisi dan telepon selular yang mereka miliki tidak dapat mengakses informasi mengenai program prioritas pemerintah terkait perikanan atau informasi lain yang pada dasarnya dibutuhkan.

Hal-hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan informasi dan persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diterbitkanlah Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik dalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program Pemerintah. Pemerintah menunjuk Kemkominfo, dalam hal ini Ditjen IKP untuk:

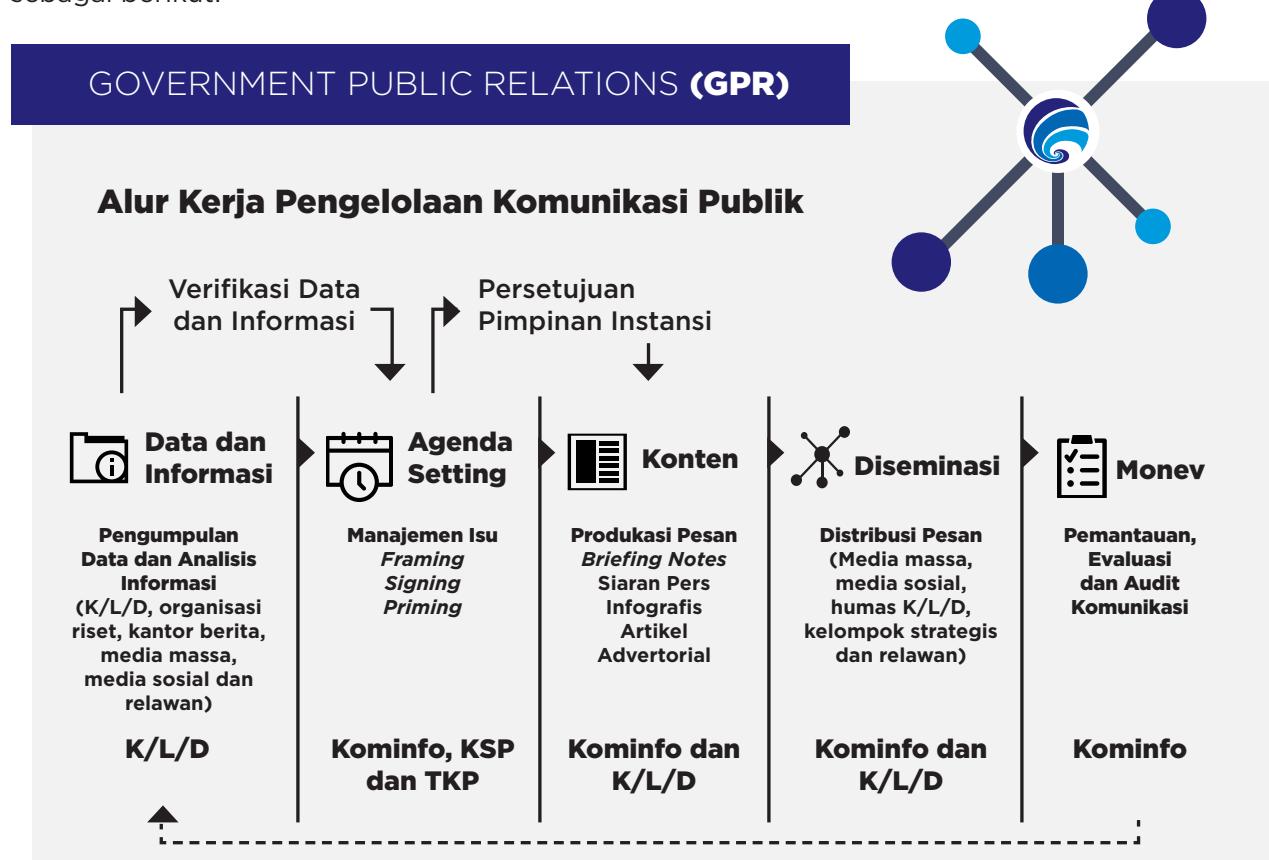
- Mengkoordinasikan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah;
- Melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian;
- Melakukan media monitoring dan analisis konten media terkait kebijakan dan program pemerintah;

- Menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden;
- Melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik;
- Dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.

Dengan adanya Inpres No. 9 Tahun 2015 ini, Ditjen IKP diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan pemerintah (Government Public Relation “GPR”). Sehingga, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik. Selain itu, penyusunan narasi tunggal sebagai agenda setting akan memberikan informasi pemerintah yang konsisten, sehingga terdapat informasi yang berimbang terhadap kinerja pemerintah sebagai perimbangan opini yang dibentuk oleh arus pemberitaan media yang cenderung kritis (negatif) terhadap pemerintah.

Maraknya berita negatif di berbagai media, serta informasi yang tidak terverifikasi maupun hoax yang beredar secara masif di media sosial di beberapa tahun belakangan ini sering menjadikan situasi yang tidak kondusif di masyarakat. Hal ini tentunya merupakan suatu isu yang harus segera dicari solusinya karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan kualitas di bidang pengelolaan komunikasi publik, dimana pemerintah setiap saat wajib memonitor isu yang sedang berkembang, menyiapkan respons melalui koordinasi dengan mekanisme yang lebih efektif.

Dalam menjalankan fungsi GPR, saat ini Ditjen IKP telah memiliki alur proses yang dilakukan dengan rutin. Namun demikian, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan setiap alurnya, sebagai berikut:



Gambar 3. Alur Kerja Government Public Relation



1. Data dan Informasi

Dalam menjalankan peran sesuai Inpres No. 9 Tahun 2015 sebagai koordinator perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik, diperlukan peran serta dan komitmen dari K/L/D terkait dalam hal pengumpulan data dan analisis informasi. Kegiatan pengumpulan data dan analisis informasi merupakan langkah pertama dalam alur proses GPR, di mana informasi dari K/L/D terkait ini digunakan sebagai rujukan utama. Data dan informasi yang valid, tepat waktu, dan berkualitas merupakan langkah awal yang penting untuk menghasilkan keluaran baik berupa narasi tunggal maupun respon lainnya atas opini maupun permasalahan yang berkembang di masyarakat dan menetapkan agenda setting yang diharapkan pemerintah.

Sejak tahun 2015, telah ditempatkan Tenaga Humas Pemerintah (THP) pada 34 Kementerian. Tujuan dari penempatan THP ini adalah untuk memperlancar masukan data dan informasi terkait program prioritas pemerintah. Penempatan THP ini cukup membantu kelancaran data dan informasi yang dibutuhkan oleh Kominfo dalam rangka menyusun narasi tunggal baik untuk penyampaian maupun manajemen isu terkait program prioritas pemerintah.

Namun demikian, penempatan THP ini direncanakan hanya berdurasi 2 tahun, yakni hingga akhir tahun 2017. Setelah masa penempatan THP ini selesai, belum ada mekanisme lain yang direncanakan untuk menggantikan peran THP dalam memastikan kelancaran informasi dan keikutsertaan K/L/D dalam rangka mendukung Inpres No. 9 Tahun 2015.



2. Agenda Setting

Agenda setting merupakan kegiatan pengelolaan informasi publik pada GPR, yang secara umum terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- Tematik/Generik Program Prioritas: Penyusunan agenda berdasarkan tematik sesuai dengan program prioritas pemerintah; dan
- Isu Prioritas: Penyusunan agenda berdasarkan analisa isu/opini publik di bidang Polhukam, Perekonomian, Maritim dan Sumberdaya serta Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dalam pengelolaan isu, terdapat dua pendekatan yaitu: pemberitaan tematik/*campaign* yang sifatnya adalah ofensif atau pemberitahuan, dan pemberitaan secara insidental yang bersifat defensive atau merupakan *counter attack* atas pemberitaan terkait program pemerintah yang tidak sesuai. Meskipun demikian, tujuan dari kedua agenda setting ini sama, yakni untuk menyiapkan suatu narasi tunggal untuk membentuk persepsi yang sama dan positif pada masyarakat atas program prioritas Pemerintah. Sehingga, informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat harus memenuhi suatu standar kualitas yang baik dan konsisten.



3. Konten

Produksi konten merupakan penerjemahan atas *agenda setting* ke dalam jenis informasi yang akan disebarluaskan. Konten atas satu informasi yang sama dapat diterjemahkan menjadi namun tidak terbatas pada *briefing notes*, siaran pers, infografis, videografis artikel, advertorial, dan sebagainya.

Jenis dan kuantitas informasi yang akan dihasilkan pada saat penyusunan konten idealnya akan sangat ditentukan oleh (1) banyaknya objek informasi yang akan disebarluaskan, dan (2) profil dari target penerima informasi. Informasi yang menjadi objek GPR adalah program prioritas pemerintah yang kontennya perlu disesuaikan dengan profil target penerima informasi. Kedua hal ini nantinya akan menentukan jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk memenuhi permintaan akan jumlah dan jenis konten yang harus diproduksi. Dengan banyaknya jenis dan jumlah konten yang harus diproduksi, sangat penting untuk tetap mampu menjaga standar dan kualitas, agar informasi yang dihasilkan memiliki mutu yang sama antara satu topik dengan topik lainnya.

Saat ini, jenis dan jumlah informasi yang digunakan untuk suatu agenda setting sangat tergantung dari ketersediaan dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Sehingga, tidak semua agenda dapat memiliki jenis dan jumlah informasi yang sama. Selain itu, saat ini juga belum terdapat suatu standar pemrosesan konten yang dapat memastikan tingkat kualitas yang seragam antar topik yang diangkat.



4. Diseminasi

Kegiatan diseminasi merupakan aktivitas penyebarluasan informasi yang dilakukan dengan basis komunikasi langsung dan tidak langsung. Namun demikian, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dan negara kepulauan terbesar di dunia, kegiatan diseminasi ini perlu memiliki suatu strategi tersendiri. Hal ini dikarenakan kedua faktor tersebut berperan dalam membentuk struktur demografi di Indonesia, di mana pembangunan yang belum merata berakibat pada perbedaan akses masyarakat terhadap pendidikan, teknologi, dan informasi. Struktur demografi ini memberi tantangan tersendiri bagi proses diseminasi informasi, yakni bagaimana agar diseminasi informasi mampu menjangkau masyarakat Indonesia dengan struktur demografi yang beragam.

Dalam suatu strategi komunikasi, sangat penting untuk mengetahui profil dari target informasi (audience). Struktur demografi yang beragam tadi akan membentuk profil audience yang berbeda pada suatu daerah/komunitas/profesi, dan sebagainya. Dengan mengetahui profil dari audience ini, maka media diseminasi yang akan digunakan untuk penyebarluasan informasi juga akan disesuaikan. Pemetaan target informasi dan media diseminasi ini bermanfaat agar suatu informasi dapat tersampaikan kepada target yang tepat dengan cepat melalui media yang tepat. Namun demikian, saat ini kemkominfo belum memiliki peta profil target diseminasi. Sehingga variasi media komunikasi untuk meningkatkan ketepatan informasi yang disampaikan masih kurang maksimal, terutama untuk variasi media komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada masyarakat rural, di daerah 3T, dan minim akses TIK.

Pelaksanaan diseminasi informasi juga melibatkan jaringan kelembagaan komunikasi, informasi dan kehumasan (KIK), yang secara potensi mencapai 956 lembaga dengan rincian 34 Kementerian, 129 lembaga pemerintah non Kementerian, 34 Pemerintah Provinsi, 420 Pemerintah Kabupaten, 94 Pemerintah Kota, 141 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 104 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yang masing-masing memiliki media/kanal penyebarluasan informasi seperti website, videotron,

dan sebagainya. Banyaknya jenis dan jumlah kanal informasi pemerintah ini memiliki potensi jangkau yang luas, terlebih lagi beberapa kanal-kanal informasi ini juga menjangkau hingga ke daerah-daerah.

Pemanfaatan kanal informasi pemerintah secara optimal mampu memberikan efek penyebaran informasi yang masif. Misalnya ketika diterbitkan suatu campaign tentang Tax Amnesty, dan disebarluaskan melalui seluruh kanal informasi pemerintah secara serentak dan konsisten dalam rentang waktu tertentu, maka akan ada banyak masyarakat akan menerima terpaan informasi yang konsisten, sehingga diharapkan akan memunculkan rasa keingintahuan lebih lanjut, hingga menjadi suatu topik pembicaraan di masyarakat, sehingga penyebaran informasi bisa menjadi lebih luas lagi. Namun demikian, fungsi Kemkominfo sebagai koordinator kehumasan Pemerintah masih belum maksimal karena belum maksimalnya strategi komunikasi yang dimiliki Kemkominfo untuk menyinergikan kekuatan penyebaran informasi di seluruh K/L/D. Hal ini tercermin dari belum seluruh kanal/media informasi yang dimiliki K/L/D digunakan untuk mendukung penyebaran informasi terkait program prioritas pemerintah.

5. Monitoring dan evaluasi



Fokus kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres No.9 Tahun 2015 adalah melakukan audit komunikasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan. Alasan perlunya dilaksanakan audit komunikasi antara lain: (1). mengetahui apakah program komunikasi berjalan dengan baik (2). membuat diagnosis tentang masalah yang terjadi atau berpotensi dan peluang yang mungkin terbuang. (3). mengevaluasi kebijakan baru atau praktik komunikasi yang terjadi. (4). memeriksa hubungan antara komunikasi dengan tindakan operasional lain. (5). menyusun anggaran kegiatan komunikasi. (6). menetapkan patok banding. (7). mengukur kemajuan dan perkembangan dengan membandingkan dengan patok banding tadi. (8). mengembangkan atau melakukan restrukturisasi fungsi-fungsi komunikasi. (9). membangun landasan dan latar belakang guna mengembangkan kebijakan dan program komunikasi baru.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Sistem perencanaan yang baik akan mendorong keberhasilan pemerintah mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan dapat bersifat jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.**

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 4. Arah Pembangunan dan Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2024

Sebagai pengejawantahan RPJPN 2005-2024, Ditjen IKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien, dan akuntabel berpedoman kepada dokumen perencanaan, baik yang bersifat jangka menengah maupun jangka pendek, yang meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
2. Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo Tahun 2015-2019
3. Penetapan Kinerja Ditjen IKP Tahun 2017

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman kepada RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Renstra Kemenkominfo Tahun 2015-2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika dalam periode 2015-2019 diprioritaskan kepada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam mendukung pencapaian Agenda Prioritas RPJMN 2015-2019, Kemenkominfo menggulirkan koridor penyusunan program kerja terpilih untuk Renstra 2015-2019. Koridor penyusunan Renstra 2015-2019 dibatasi oleh janji Trisakti dan Nawa Cita.

Visi Kemenkominfo untuk tahun 2015-2019, mengacu kepada visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 yakni **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

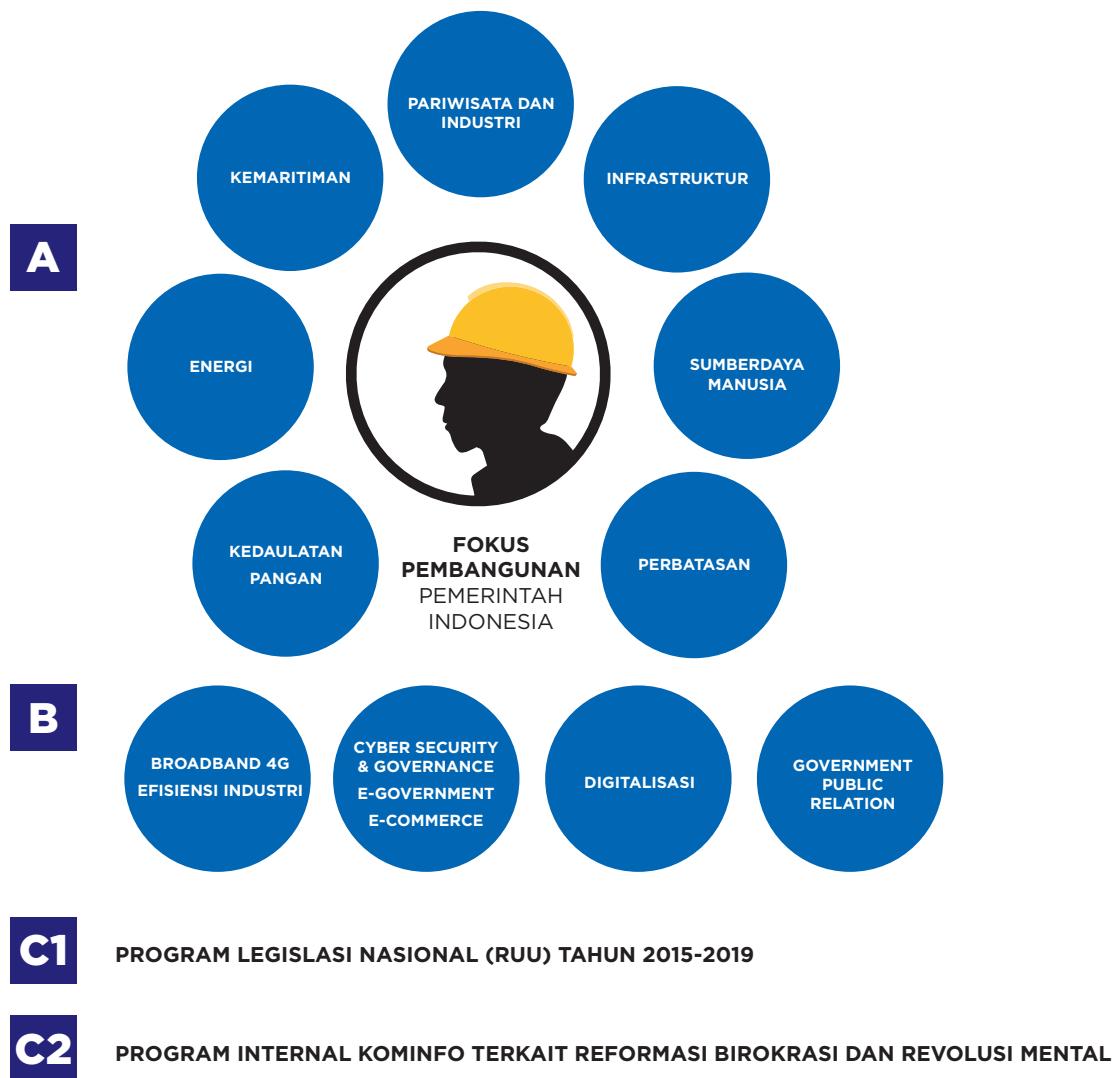
Visi digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kemenkominfo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemenkominfo diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK

Sementara itu, **tujuan Kemenkominfo** antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Adapun **Sasaran Strategis Pembangunan Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019** disusun dengan 4 fokus utama yakni:

1. Kemenkominfo sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan
2. Kemenkominfo sebagai *leading sector* di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran
3. Kemenkominfo sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran
4. Kemenkominfo sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.



Gambar 5. Fokus Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Tahun 2017 menjadi tahun ketiga bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Renstra Kemkominfo Tahun 2015–2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015–2019, yang kemudian direviu dan disusun perubahannya dengan turut mengadopsi tantangan dan masalah strategis terkini. Perubahan atas Renstra Kemkominfo Tahun 2015–2019 akhirnya ditetapkan tanggal 2 Desember 2016, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016. Perubahan terhadap sasaran dan indikator dalam Renstra Kemkominfo Tahun 2015–2019 antara sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1. PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA 2015 – 2019 SEBELUM DAN SESUDAH REVISI

PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015-2019)		PM Kominfo No. 21 Tahun 2016 Perubahan PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015–2019)	
Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
SS.1 Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan		SS.1 Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia	
IKSS.1	Jumlah pembangunan sarana/Tugu Berkode Pos di wilayah perbatasan dan pulau terdepan di Indonesia	IKSS.1	Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan backbone serat optik Nasional (Jumlah Kab/kota: 514)
IKSS. 2	Persentase (%) penyelesaian Redesain USO	IKSS.2	Persentase (%) Kab/Kota terlayani akses broadband 4G LTE (Jumlah Kab/kota: 514)
IKSS. 3	Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi (tertinggal, terluar, terpencil)	IKSS.3	Persentase (%) desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri terlayani jasa akses telekomunikasi (Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri: 5.520 Desa) Desa 3T tanpa sinyal: 5.087 desa Desa 3T + Lokpri tanpa sinyal: 433 desa
IKSS.4	Jumlah penyediaan akses pital-ebar internet	IKSS.4	Persentase (%) kawasan perbatasan terlayani jasa akses telekomunikasi (Jumlah kawasan perbatasan: 187 Kecamatan) Total kecamatan Lokpri berdasarkan Perka BNPP No.1/2015= 187 lokasi prioritas

PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015-2019)		PM Kominfo No. 21 Tahun 2016 Perubahan PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015–2019)	
Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
IKSS.5	Persentase (%) tersedianya satelit pitalebar nasional	IKSS.5	Persentase (%) harga layanan pita lebar terhadap PDB per kapita
	IKSS.7 IKSS.8	IKSS.6	Persentase (%) implementasi digitalisasi penyiaran/Analog Switch Off (ASO)
	IKSS.9 IKSS.10 IKSS.11	Persentase (%) nelayan dan petani go digital (Jumlah petani + nelayan per Tahun 2013: 28,7 Juta)	
	IKSS.12	Persentase (%) UMKM go digital (Jumlah UMKM per Tahun 2012: 56 juta)	
		Persentase (%) desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri tersedia layanan digital ((Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri: 5.520 Desa) Desa 3T tanpa sinyal: 5.087 desa Desa 3T + Lokpri tanpa sinyal: 433 desa)	
		Jumlah anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar yang memperoleh literasi TIK	
		Jumlah masyarakat umum yang memperoleh literasi TIK	
		Jumlah angkatan kerja yang tersertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK	
SS.2 Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan		SS.2 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	

PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015-2019)		PM Kominfo No. 21 Tahun 2016 Perubahan PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015–2019)	
Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
IKSS.1	Persentase (%) ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung layanan akses bergerak pitalebar	IKSS.1	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (Survei Responden/Publik)
IKSS.2	Persentase (%) kab/kota yang terhubung jaringan tulang punggung serat optik nasional Palapa Ring		
IKSS.3	Persentase (%) selesainya migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital (
IKSS.4	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan nomor panggilan tunggal darurat nasional (single public emergency number)		
IKSS.5	Persentase (%) Kab/Kota yang memiliki infrastruktur pasif telekomunikasi melalui supervisi Kemenkominfo		
IKSS.6	Persentase (%) penetapan dan implementasi Permen kominfo tentang TKDN 4G LTE		
IKSS.7	Persentase (%) instansi pemerintah yang terintegrasi layanan e-government Nasional		
IKSS.8	Jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mengimplementasikan DNS Nasional		
IKSS.9	Persentase (%) peningkatan perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan komunikasi dan informatika (ID-SIRTII dan KAMINFO)		
SS.3 Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman		SS. 3 Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif	
IKSS.1	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi	IKSS.1	Opini laporan keuangan
IKSS.2	Jumlah Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan National Chief Information Officer (NCIO)	IKSS.2	Indeks Reformasi Birokrasi

PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015-2019)		PM Kominfo No. 21 Tahun 2016 Perubahan PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015—2019)	
Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
IKSS.3	Jumlah Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan	IKSS.3	Nilai akuntabilitas kinerja
IKSS.4	Jumlah regulasi untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik		
IKSS.5	Jumlah regulasi terkait implementasi Government Publik Relations (GPR)		
IKSS.6	Jumlah kebijakan terkait diseminasi Kampanye Nasional Revolusi Mental		
SS. 4 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien		-	
IKSS.1	Percentase (%) rekomendasi kebijakan berbasis penelitian/kajian (termasuk studi dampak sosial ekonomi implementasi pitalebar, internet, dan Digitalisasi Penyiaran)	-	-
IKSS.2	Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda		
IKSS.3	Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo		
IKSS.4	Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas		
IKSS.5	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika		
IKSS.6	Percentase (%) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenkominfo		
IKSS.7	Percentase (%) terselesaikannya pelaksanaan kebijakan Change Management		
IKSS.9	Percentase (%) tersedianya sistem dan mekanisme Partisipasi Publik (Planning, design, execution dan monitoring) anggaran dan kebijakan		

Menyesuaikan revisi renstra Kemkominfo tersebut, terjadi perubahan juga terhadap rencana strategis di eselon I termasuk di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:

**Tabel 2. Perubahan Matriks Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik**

Program	Sasaran	Indikator Semula	Indikator Menjadi	2017	2018	2019
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik						
	Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan Informasi Publik					
		Percentase (%) Pemda yang menyebarkan konten informasi publik sesuai regulasi penyebaran informasi	Percentase (%) Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah;	70%	80%	90%
		Percentase (%) tingkat pertumbuhan produksi konten berbasis edukasi	Percentase (%) Konten informasi publik tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah yang disampaikan, berkualitas baik;	100%	100%	100%
		Percentase (%) masyarakat daerah yang sadar informasi	Percentase (%) Pemanfaatan Saluran Komunikasi dalam rangka Penyampaian Informasi Publik tentang kebijakan pemerintah disampaikan secara cepat dan tepat	70%	80%	90%
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik					
		Percentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik	Tidak dilanjutkan	-	-	-
		Percentase (%) akses masyarakat terhadap informasi melalui Lembaga sosial dan Lembaga penyiaran/media yang strategis	Tidak dilanjutkan	-	-	-

B. Perjanjian Kinerja 2017

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis, setiap tahunnya perencanaan strategic dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja Tahunan. Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategik, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/ kegagalan penyelenggaraan pemerintah untuk periode satu tahun ke depan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kerja Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2017

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan Informasi Publik	Percentase (%) Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%
		Percentase (%) konten informasi publik tentang kebijakan dan program prioritas yang disampaikan, berkualitas baik	100%
		Percentase (%) informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	70%
		Percentase (%) pengelolaan kanal informasi pusat, daerah dan Mitra	60%
		Percentase (%) penyusunan regulasi/kebijakan bidang komunikasi publik	80%
2	Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	Tidak terdapatnya temuan negatif yang berpengaruh terhadap opini atas Laporan Keuangan	100%

BAB III

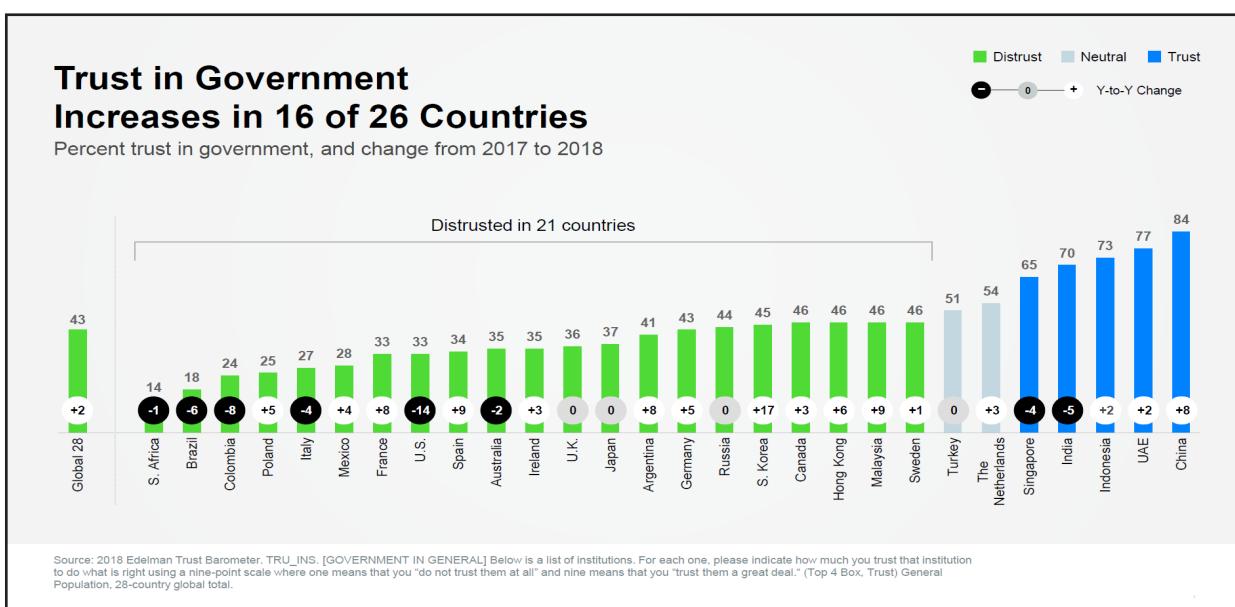
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Renstra Kemkominfo yang didukung oleh capaian kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2017

Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi sebagai tolak ukur kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program dengan hasil capaian satu tahun. Dalam mengukur capaian kinerja diperlukan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian cuatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja organisasi.

Salah satu capaian kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2017 untuk mendukung capaian Rencana Strategis Kementerian Kominfo, tertuang dalam Sasaran Strategis nomor 2 Renstra Kemkominfo yakni Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang mempunyai target Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (Survei Responden/Publik).

Tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat terhadap program-program pemerintah berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. Hal tersebut tercermin dalam release terbaru dari Edelman Trust Barometer Tahun 2018 dimana tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia mendapatkan skor yang tinggi (73%). Terdapat kenaikan 2 poin dari skor tahun lalu yang menempatkan pemerintah Indonesia masuk kedalam 5 (lima) negara yang ada di level terpercaya. Pemerintah Indonesia menempati urutan kedua sebagai institusi yang dipercaya masyarakat setelah institusi bisnis (78%) dan dibawahnya ada seperti media (68%) dan NGO/LSM (67%).



Gambar 6. Hasil Survei Edelman Trust Barometer, Tahun 2018
[\(<http://www.edelman.com/global-results/>\)](http://www.edelman.com/global-results/)

<i>Trust in Institutions</i>		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Government	36%	49%	49%	65%	58%	71%	73%
	Media	68%	73%	69%	68%	63%	67%	68%
Rp	Business	63%	69%	68%	70%	71%	76%	78%
	NGO's	49%	53%	62%	64%	57%	64%	67%

Gambar 6.1 Hasil Survei Edelman Trust Barometer, Tahun 2018 (<http://www.edelman.com/global-results/>)

Hasil tersebut membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui program-program dan hasil-hasil pembangunan pemerintah. Dengan semakin besarnya pengetahuan publik, maka akan makin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, peran Government Public Relations dalam mendiseminasikan informasi tentang program-program dan hasil-hasil pembangunan pemerintah menjadi krusial. Capaian dari indikator persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik dari Tahun 2015 – 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik

Indikator Kinerja	Satuan	2015		2016		2017		Capaian (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase (%) Kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik	%	-	-	60% (1-49% = distrusters; 50-59% = neutral; 60-100% = trusters)	71% (1-49% = distrusters; 50-59% = neutral; 60-100% = trusters)	50% (1-49% = distrusters; 50-59% = neutral; 60-100% = trusters)	73 % (1-49% = distrusters; 50-59% = neutral; 60-100% = trusters)	146 %

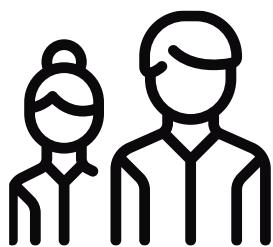
Dalam mengukur tingkat kepuasan publik terhadap akses dan kualitas informasi publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik juga melaksanakan survei responden online. Akses Informasi Publik tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah perlu ditakar sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan komunikasi publik pemerintah. Untuk mengukur capaian dari indikator diatas dilakukan dengan cara survei yang dilakukan melalui kanal di kalangan pengguna media social (Facebook, Twitter, Instagram dan Line) @kemkominfo dan @DJIKP. Survei ini diharapkan dapat menakar kepuasan atas layanan informasi yang dilakukan oleh pemerintah dan dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengembangan program komunikasi publik pemerintah ke depan.

Dalam survei ini digunakan tiga kelompok indikator, yaitu

- Kelompok indikator PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN yang diarahkan untuk menakar terpaan, ingatan, penjelasan kembali atas informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah
- Kelompok indikator KUALITAS INFORMASI yang mencakup aspek akurasi, ketepatan waktu, relevansi kemanfaatan dan kemudahan untuk dipahami dan diperoleh.
- Kelompok indikator SALURAN KOMUNIKASI yang mencakup ragam saluran dan ketepatan waktu penyampaian

Jumlah populasi pengikut/penyuka laman media sosial @kemkominfo dan @DJKIP total 921.877 orang, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin error 2, maka jumlah sampel survey yang dibutuhkan sebanyak **2.395** orang responden. Dalam survei ini didapatkan total sampel 2.855 orang responden yang dapat diolah.

Dari hasil survei mendapatkan hasil bahwa sebanyak 80, 21% menyatakan puas terhadap layanan informasi mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah, sedangkan sisanya 19, 79% menyatakan tidak puas atas informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah. Selain itu, berdasarkan hasil survei, masyarakat memperoleh informasi tentang program kebijakan pemerintah dominan bersumber dari media online sebanyak 98, 11%, media sosial 96, 81% dan televisi 93, 66%. Dari kelompok media tercetak dan elektronik, media televisi dan surat kabar atau koran masih dominan digunakan oleh responden untuk mengakses informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah. Media online dalam bentuk website atau portal dominan digunakan untuk mengakses informasi publik. Adapun media interaktif dan below the line yang banyak digunakan responden mengetahui informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah adalah media tatap muka/dialog interaktif.



Dari 2855 responden, sebanyak 80,21% menyatakan puas atas layanan informasi mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah. Hanya 19,79% yang tidak puas atas informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah.

Gambar 7. Hasil Survei Online Terhadap Akses Informasi Publik tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

B. Capaian Kinerja Eselon I

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2017 dalam sasaran 1 yakni Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan Informasi Publik terdapat 5 Indikator Kinerja Program yang capaiannya sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Perjanjian Kinerja Eselon I Sasaran 1 Indikator No.1

No	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja	%
1	Persentase (%) Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	Survey Persepsi yang dilaksanakan kepada masyarakat penerima informasi publik.	84, 58 %

Dari hasil Survei Online Terhadap Akses Informasi Publik tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah terjaring 2855 responden, sebanyak 84,58% menyatakan mengetahui informasi mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah. Hanya 15,42% yang tidak pernah menerima atau mengetahui informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah. Adapun secara detil sebaran aspek pengetahuan terdapat dalam gambar berikut:

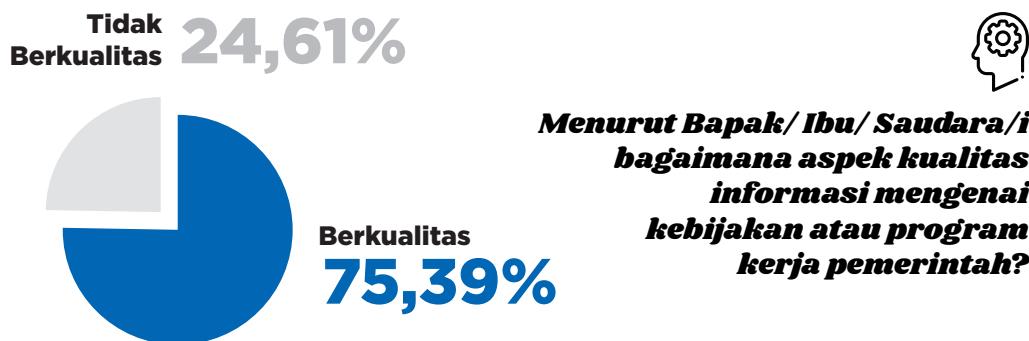


Gambar 8. Hasil Survei Online Pengetahuan Terhadap Kebijakan dan Program Pemerintah

Tabel 4. Capaian Perjanjian Kinerja Eselon I Sararan 1 Indikator No.2

No	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja	%
2	Percentase (%) konten informasi publik tentang kebijakan dan program prioritas yang disampaikan, berkualitas baik	100%	Survey Persepsi yang dilaksanakan kepada masyarakat penerima informasi publik.	75,39%

Dari penilaian secara umum, sebanyak 75,39% dari 2855 responden menyatakan konten informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah yang disajikan berkualitas. Hanya 24,61% yang tidak pernah menerima atau mengakses informasi publik.

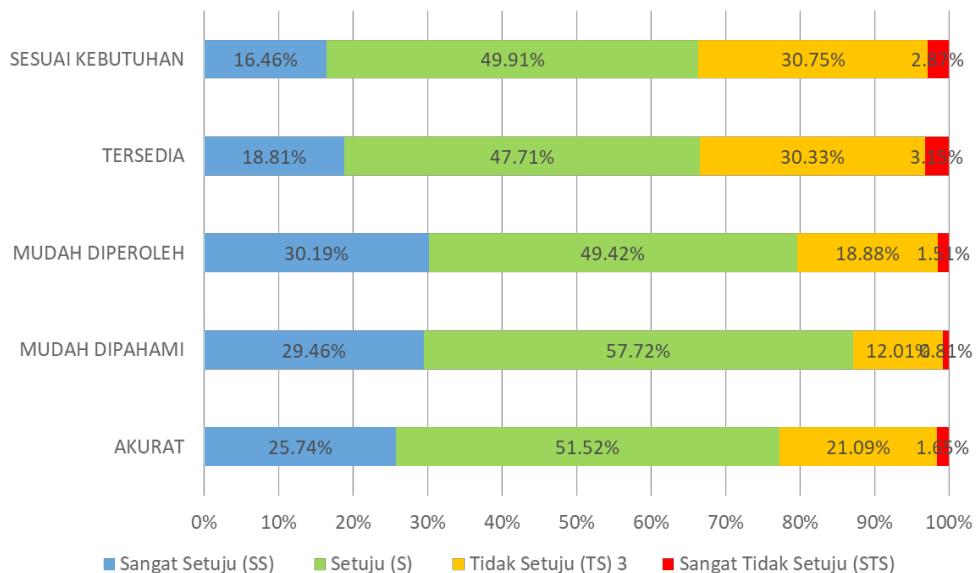


Gambar 9. Hasil Survei Online Pengetahuan Terhadap Konten Informasi Publik

Tabel 5. Capaian Perjanjian Kinerja Eselon I Sasaran 1 Indikator No.3

No	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja	%
3	Percentase (%) informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	70%	Survey Persepsi yang dilaksanakan kepada masyarakat penerima informasi publik.	75,38%

Untuk mengukur indikator Persentase (%) informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat dalam survei online yang telah dilaksanakan unsur cepat dan tepat dibagi menjadi kategori sifat informasi yang sesuai kebutuhan, tersedia, mudah diperoleh, mudah dipahami dan akurat. Dari penilaian secara umum, sebanyak 75,38 % dari 2855 responden menyatakan konten informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah yang disajikan berkualitas. Hanya 24,62 % yang tidak pernah menerima atau mengakses informasi publik.



Gambar 10. Hasil Survei Online Pengetahuan Terhadap Informasi Publik

Tabel 6. Capaian Perjanjian Kinerja Eselon I Sasaran 1 Indikator No.4

No	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja	%
4	Percentase (%) pengelolaan kanal informasi pusat, daerah dan Mitra	60%	<ul style="list-style-type: none"> • Kanal Medsos K/L/D • Kanal Medsos Pers Mahasiswa Seluruh Indonesia • Kanal LINE • Kanal KASKUS • Kanal KIM • Kanal “Ruang Publik” di LPP TVRI & RRI 	100%

Target awal dari indikator diatas adalah 60% terlaksananya pengelolaan kanal penyebaran informasi melalui 7 kanal yakni: Satgas media sosial Kementerian/Lembaga/Pemda, Pers Mahasiswa Seluruh Indonesia, Line, Kaskus, Kelompok Informasi Masyarakat dan acara “Ruang Publik” di LPP TVRI dan RRI. Capaian akhir tahun adalah 100 % dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan kanal medsos di K/L/D dengan pembentukan Satgas Medsos K/L/D;
2. Kerjasama Diseminasi Informasi Publik melalui kanal Medsos Pers Mahasiswa Seluruh Indonesia;
3. Kerjasama Diseminasi Informasi Publik melalui kanal Aplikasi LINE Indonesia;
4. Kerjasama Diseminasi Informasi Publik melalui kanal situs forum terbesar di Indonesia KASKUS;
5. Kerjasama Diseminasi Informasi Publik melalui Kanal Blogger di 9 Provinsi (Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat , Lampung, Sumatera Utara, NTB dan Jawa Timur)
6. Kerjasama Diseminasi Informasi Publik melalui Kanal Kelompok Informasi Masyarakat di 3 Provinsi (Kalimantan Barat, Kepulauan Riau dan Banten);
7. Kerjasama Diseminasi Informasi Publik melalui kanal “Ruang Publik” sebanyak 21 episode di LPP TVRI dan 22 episode di LPP RRI.

Tabel 6. Capaian Perjanjian Kinerja Eselon I Sasaran 1 Indikator No.4

No	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja	%
5	Percentase (%) penyusunan regulasi/kebijakan bidang komunikasi publik	80%	<ul style="list-style-type: none"> RPM Kominfo tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Urusan IKP RPM dan Lampiran RPM Kominfo tentang Standar Kompetensi Teknis ASN Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo RPM dan Lampiran Jabatan Fungsional Pranata Humas yang terdiri dari: Petunjuk teknis Penyusunan Formasi JFPH Petunjuk Teknis Pengangkatan, Ke-naikan Jabatan/Pangkat, Perpindahan Jabatan, dan Pemberhentian JFPH Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit JFPH 	80%

*Catatan: 5 Rancangan Peraturan Menteri tersebut telah mendapatkan persetujuan uji publik draf final peraturan/regulasi oleh Menteri.

Tabel 7. Capaian Perjanjian Kinerja Eselon I Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	%
Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	Tidak terdapatnya temuan negatif yang berpengaruh terhadap opini atas Laporan Keuangan	100%	Tidak terdapat temuan negatif yang berpengaruh terhadap opini atas Laporan Keuangan tahun 2016*	100%

*Catatan: tidak terdapat temuan negatif atas laporan keuangan tahun 2016 (audited), sementara untuk laporan keuangan 2017 masih dalam proses audit.

C. Capaian Kinerja Eselon II

c.1. Kinerja Direktorat Komunikasi Publik

Capaian kinerja Direktorat Komunikasi Publik yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi public secara kesuluruhan mencapai target. Hanya saja capaian kinerja di Sasaran nomor 1 yakni Regulasi/Kebijakan Bidang Komunikasi Publik yang tidak mencapai target. Dari 5 target yang direncanakan semua telah menjadi Rancangan Peraturan Menteri (RPM) dan mendapatkan persetujuan untuk dilaksanakan uji publik, namun status sampai laporan ini disusun dari 5 RPM tersebut belum ada yang disahkan menjadi PM. Kendala-kendala yang dihadapi terkait belum tercapainya target antara lain karena dengan terbitnya Instruksi Presiden No.7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah yang mewajibkan K/L untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan terutama yang berdampak strategis dan massif dengan kementerian koordinator untuk mendapatkan rekomendasi lebih lanjut.

Adapun rincian capaian kinerja Direktorat Komunikasi Publik di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Direktorat Komunikasi Publik

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja	%
1	Regulasi/Kebijakan Bidang Komunikasi Publik	Jumlah Kebijakan dan standarisasi di bidang komunikasi dan informasi publik	5	<ul style="list-style-type: none"> RPM Kominfo tentang Pedoman Penyelegaraan Pemerintahan Sub Urusan IKP RPM dan Lampiran RPM Kominfo tentang Standar Kompetensi Teknis ASN Penyelegara Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo RPM dan Lampiran Jabatan Fungsional Pranata Humas yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Petunjuk teknis Penyusunan Formasi JFPH Petunjuk Teknis Pengangkatan, Ke-naikan Jabatan/Pangkat, Perpindahan Jabatan, dan Pemberhentian JFPH Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit JFPH 	80
2	SDM bidang Komunikasi Publik yang dibina kompetensi dan kualitasnya	Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi	200	<p>Rakor Peningkatan Kapastias JFPH sebagai ASN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sulawesi Selatan (50 orang) Sumatera Utara (90 orang) Bangka Belitung (70 orang) Uji Kompetensi/Inpassing Jabatan Fungsional Pranata Humas (33 orang) 	100
		Jumlah SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik Negara yang meningkat kemampuannya dalam implementasi UU KIP	250	<p>Pelaksanaan Bimtek PPID di 5 lokasi dengan jumlah total peserta 464 orang</p> <ol style="list-style-type: none"> Sulbar (82 peserta) Maluku Utara (97 peserta) Sulawesi Tenggara (86 peserta) Papua Barat (105 peserta) Maluku (94 peserta) 	100
		Jumlah aparatur SKPD Provinsi yang meningkat kualitas tata kelolanya di bidang informasi dan komunikasi publik	300	<ul style="list-style-type: none"> Bimtek Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo Sub Urusan IKP di Yogyakarta, Makassar, Balikpapan, Medan, Jambi, Jayapura, Bandung, Denpasar dengan total jumlah peserta 1037 orang Workshop NSPK Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Urusan IKP di Manado dan Aceh total peserta 142 orang 	100

		Jumlah Forum Koordinasi PPID	2	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat Propinsi se-Indonesia Rapat Kerja Teknis Nasional bidang Komunikasi dan Informatika dihadiri 400 lebih perwakilan Dinas Kominfo Tingkat Prov/Kab/Ko, 4-6 Desember 2017 di Jakarta 	100
		Pelayanan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas	12	Pelayanan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas dilaksanakan selama 12 bulan	100
		Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017	1	Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017 melalui Monitoring dan Evaluasi di 163 PPID K/L/D	100
3	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi Publik	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang UU KIP	1000	<p>Dilaksanakan melalui Workshop Netizen 2020 di 16 Kampus seluruh Indonesia dengan jumlah peserta total 1600 orang</p> <ol style="list-style-type: none"> Universitas Papua Universitas Cendrawasih Universitas Khairun Universitas Nusa Cendana Universitas Tanjung Pura Universitas Kapuas Sintang Universitas Palangkaraya Universitas Antakusuma Universitas Madura Universitas Borneo Tarakan Universitas Lambung Mangkurat Universitas Balikpapan Universitas Mulawarman Universitas Sriwijaya Universitas Pattimura Universitas Mataram 	100
		Dialog interaktif sosialisasi UU KIP	12	Dialog interaktif "Sebaiknya Anda Tahu" di RRI Pro 3 FM sebanyak 22 episode	100
4		Tersedianya Peta Profil Target Diseminasi Informasi dan Media Diseminasi	2	<ul style="list-style-type: none"> Peta Komunikasi berdasarkan demografi Peta Komunikasi berdasarkan konten dan strategi 	100



Gambar 11. Rapat Kerja Teknis Nasional Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, 4-6 Desember 2017 di Hotel Grand Sahid Jakarta

Tabel 9. Rekap PPID per Desember 2017

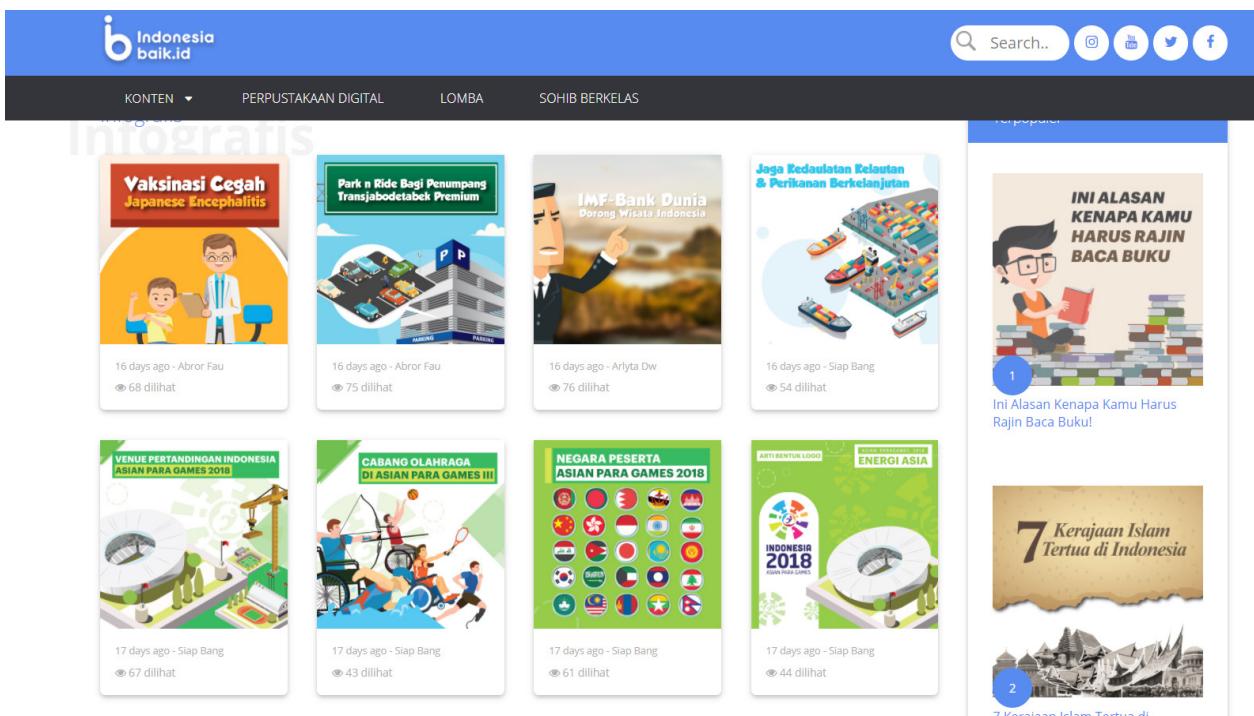
No	Lembaga	Jumlah	Telah Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Persentase (%)	Persentase per kluster
1	Kementerian	34	34	100.00%	53%
2	Lembaga Negara/Lembaga Setingkat Menteri/LNS/LPP	126	51	40.48%	
3	Provinsi	34	33	97.06%	74%
4	Kabupaten	416	286	68.75%	
5	Kota	98	85	86.73%	
TOTAL		708	489	69.07%	

C.2. Kinerja Direktorat Pengolahan Dan Penyediaan Informasi

Capaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan dan penyediaan informasi, secara umum sudah baik ditandai dengan seluruh target telah mencapai 100%. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian Direktorat Pengelohan dan Penyediaan Informasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja	%
1	Tersediannya Konten Informasi Publik	Jumlah analisis Isu Publik Media Nasional	300	441 (Analisis Hasil Monitoring Isu Publik) dan (Media Content Analysis)	100
		Jumlah Dokumen Database Informasi Publik Sektoral, videografis dan Infografis informasi publik	1100	<ul style="list-style-type: none"> • Infografis 795 • Videografis 713 	100
		Jumlah judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan disebarluaskan kemasyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya (terutama daerah terdepan, terluar, tertinggal)	40	44 Konten Informasi Publik terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • 10 komik • 28 video • 6 paket visual interaktif 	100



Gambar 12. Infografis Informasi Publik di laman portal IndonesiaBaik.id



Gambar 13. Produk Konten Informasi Publik di aplikasi Sakuin

3.3 Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Publik

Capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Media Publik yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang media publik secara umum sudah baik ditandai dengan 5 (lima) target telah mencapai bobot 100% dan hanya 1 (satu) tidak mencapai target. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian Direktorat Pengelolaan Media Publik

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja	%
1	Layanan Informasi Publik	Penyebaran Informasi Publik	92 keg	90 keg	97
		Diseminasi informasi terkait tema revolusi mental melalui media pertunjukan rakyat	12	60 (Kerjasama DPR RI); 3 (Perppu Ormas)	100
		Pengelolaan Newsroom dan Media Center	12	Jumlah berita : 13182 selama 12 bulan layanan	100
2	Pembangunan Media Center	Bimtek Pengelolaan Media Center	180	<ul style="list-style-type: none"> Kota Tangerang : 76 peserta Kota Palembang : 95 peserta Kota Semarang : 60 peserta Kota Mataram : 55 peserta 	100



Gambar 14. Produk Konten Informasi Publik di Komunika/Infopublik/JPP



Gambar 15. Pertunjukan Rakyat Sosialisasi Perpu Ormas

C.4. Kinerja Direktorat Kemitraan Komunikasi

Capaian kinerja Direktorat Kemitraan Komunikasi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah, secara umum sudah cukup baik ditandai dengan hampir semua target telah mencapai 100%. Hanya ada 1 (satu) dari 4 target yang tidak mencapai 100%. Adapun rincian capaian Direktorat Kemitraan Komunikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Direktorat Kemitraan Komunikasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja	%
1	Kemitraan dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Media dan Komunitas dalam rangka efektifitas penyebaran informasi	Jumlah Dokumen Laporan Bulanan Aktifitas Tenaga Humas Pemerintah yang ditempatkan di Kementerian dan Lembaga	492 laporan	289 laporan	60

		Jumlah Pengelolaan Kanal Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Media dan Komunitas dalam rangka diseminasi informasi	7 Kanal	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan kanal medsos wilayah Banten, Maluku, Jawa Barat, Bali, dan Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi I & II Pembentukan Satgas Medsos K/L dan Pemda Pemberdayaan kanal medsos melalui temu pers mahasiswa seluruh Indonesia Penetapan kerjasama dengan LINE dan Kaskus Kerjasama dengan twitter, percepatan verifikasi akun K/L dan Pemda Monev efektifitas penyebaran informasi melalui satgas medsos K/L dan Pemda Penayangan LINE (38 ribu subs) dan Indonesia update (Kaskus) Penyebaran 62 Narasi Tunggal dengan 30% jangkauan (reach) Penyebaran isu prioritas kepada blogger (flashblogging) di wilayah Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Utara, NTB dan Jawa Timur Penyebaran isu prioritas melalui KIM di wilayah Kalbar, Kepri dan Banten Penyebaran isu prioritas melalui LPP TVRI dan RRI sebanyak 21 episode (TVRI) dan 22 episode (RRI) 	100
2	Diseminasi Melalui Kolaborasi Komunikator Pemerintah di Wilayah 3 T	Jumlah dokumen Pedoman pelaksanaan Jupen	1 Naskah	SK Pengangkatan Penyuluhan Informasi Publik (Jupen)	100
		Jumlah Pilot Project Jupen	150 kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Daftar lokasi pilot project yang mencakup 11 Provinsi dan 34 Kab/Kota Bimbingan Teknis Penyuluhan informasi Publik (Jupen) Penempatan 150 tenaga PIP (Jupen) Sosialisasi isu/program prioritas pemerintah melalui PIP (Jupen) Monev aktifitas diseminasi informasi melalui Penyuluhan Informasi Publik (Jupen) 	100



Gambar 16. Penyebaran Informasi Publik Melalui Komunitas Blogger di Daerah



Gambar 17. Menkominfo bertindak menjadi host acara “Ruang Publik” di LPP TVRI bulan Juli 2017

C.5. Kinerja Direktorat Layanan Informasi Internasional

Capaian kinerja Direktorat Layanan Informasi Internasional yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi internasional, peningkatan peran media internasional, dan kemitraan perwakilan negara asing dan lembaga internasional. Secara umum sudah cukup baik ditandai dengan 3 (tiga) indikator target telah mencapai 100%. Adapun rincian capaianya Direktorat Layanan Informasi Internasional adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Direktorat Layanan Informasi Internasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja	%
1	Konten Pencitraan Positif Indonesia di Dunia Internasional	Jumlah produksi dan publikasi konten pencitraan positif tentang Indonesia berbahasa asing	24	24 konten informasi telah dibuat yaitu Buku Handbook of Indonesia FOI edisi 5, FOI edisi 6, Billboard Sail Sabang	100

2	Layanan Kemitraan dengan Perwakilan Negara Asing, Lembaga Internasional Serta Mitra Strategis	Jumlah kemitraan dengan perwakilan negara asing, lembaga internasional serta media asing dalam rangka pencitraan positif Indonesia	10	10 kemitraan yaitu: Kunjungan KIM Malaysia, Bimtek dengan Dinas Infokom Bali, dan mengikuti Sidang ASEAN SOMRI	100
		Jumlah masyarakat Indonesia dan masyarakat asing yang menerima informasi tentang kebijakan internasional pemerintah	1000	1500 orang Kegiatan : Pertunjukan Rakyat mendukung Sail Sabang, Serta tema kebhinnekaan dan kebangsaan di Solo dan Yogyakarta. Forum Dialog Literasi Media Sosial kerjasama dengan KWI, dan Walubi	100



Gambar 18. Produk Konten Informasi Pencitraan Positif Indonesia Melalui Majalah Fol dan Handbook of Indonesia 2017

C.6. Kinerja Sekretariat Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik

Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal IKP yang mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, secara umum sudah cukup baik ditandai dengan hampir semua target telah mencapai bobot 100%. Ada satu target hanya mencapai nilai 33% karena hanya tersusun 2 dokumen dari target 6 dokumen yang direncanakan.

Tabel 14. Capaian Sekretariat Ditjen IKP

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja	%
1	Layanan dukungan manajemen eselon I	Jumlah dokumen perencanaan	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renja 2018 2. PK Es 1, 2, 3 & 4 3. RKAKL 2018 4. RKAKL APBN-P 2017 5. RKAKL Pagu Indikatif 2018 6. RKAKL Pagu Definitif 2018 	100

		Jumlah Dokumen Monev dan Laporan Kinerja	5	1. LAKIP 2016 2. LAPTAH 2016 3. Laporan TW I & TW II 4. Laporan TW III 5. Laporan TW IV	100
		Jumlah dokumen Peraturan Perundang-undangan	6	• Dok Evaluasi Produk Hukum IKP • RUU Perlindungan Data Pribadi	33
		Jumlah dokumen kerjasama	5	1. Dok Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Pembangunan Jakarta 2. Dok Perjanjian Kerjasama dengan PT. Lintas Cipta Media 3. Dok Perjanjian Kerjasama dengan STIK London School of Public Relations Jakarta 4. Dok Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI 5. Dok Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia	100
		Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang sesuai SAI dan peraturan perundang-undangan lainnya	4	1. Dok Laporan Keuangan Audited 2016 2. Dok Lap Keuangan Sem I 3. Dok Lap Keuangan TW III 4. Dok Lap Keuangan Sem II	100
		Jumlah Pelaksanaan Ketatausahaan	12	12 Bulan layanan Ketatausahaan	100
		Jumlah Pegawai yang meningkat Kapasitasnya melalui pelatihan SDM	100	150 Peserta Pelatihan Keahlian di bidang IKP "Gen-Y"	100
		Jumlah Dukungan Operasional Pelaksanaan Inpres No.9 Tahun 2015 ttg Pengelolaan Komunikasi Publik	12	12 Bulan Dukungan	100
2	Regulasi tentang undang-undang perlindungan data pribadi	Penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi dan Penyempurnaan serta pengembangan Materi RUU	1	1 Dokumen Laporan Harmonisasi Nasional Akademik RUU PDP	100

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil pencapaian lingkup Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkup Eselon II Ditjen IKP sebagian besar telah memenuhi bobot 100%. Pencapaian di lingkup Eselon II tersebut mendukung (berkorelasi) terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon I Ditjen IKP. Kondisi itu menandakan bahwa capaian kinerja dilingkungan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik secara umum sudah memenuhi target yang direncanakan.

Tabel 15. Korelasi Pengukuran Capaian IKU dan IKK di Lingkup Ditjen IKP

Satuan Kerja Eselon II	Realisasi Yang Mencapai Bobot 100%	Perjanjian Kinerja Ditjen IKP	Realisasi Yang Mencapai Bobot 100%
Direktorat Komunikasi Publik	90 %		
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi	100%		
Direktorat Pengelolaan Media Publik	90%		
Direktorat Kemitraan Komunikasi	90%		
Direktorat Layanan Informasi Internasional	100%		
Sekretariat Ditjen IKP	90%		

Perjanjian Kinerja Ditjen IKP **83 %**
 Hanya 1 IKK
 dari 6 yang tidak mencapai target

Saran

Ditjen IKP perlu meninjau kembali (review) secara regular agar IKU dan IKK dapat lebih berkaitan (berkorelasi erat) sehingga capaian Program Ditjen IKP Tahun 2017 dapat mencapai target yang ditetapkan. Review konprehensif harus dilakukan terhadap Indikator Kinerja yang merujuk kepada RPJMN 2015-2019 maupun Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Direktif Menkominfo .Upaya peninjauan kembali tersebut perlu dibahas secara bersama-sama oleh Kemenkominfo, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu dan berbagai stakeholders terkait lain. Hal itu karena perbaikan IKU dan IKK akan mengubah Rencana Strategis Ditjen IKP yang tercantum dalam lampiran RPJMN 2015-2019.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perbaikan IKU dan IKK adalah seluruh IKU dan IKK dipastikan harus selaras dan setiap indikator tersebut dipastikan dapat diukur berkonsep SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely). Pengukuran IKU yang bersifat Outcome perlu disempurnakan dengan menyusun data dasar awal dan dirancang metodologi pengukurannya melalui survei komprehensif (bila memungkinkan tidak hanya melalui survei online) yang mewakili masyarakat yang menjadi sasaran diseminasi informasi public.

Referensi

Undang-Undang No.14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025

Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) No. 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016. Perubahan terhadap sasaran dan indikator dalam Renstra Kemkominfo Tahun 2015–2019

Instruksi Presiden No.9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik

Edelman Trust Barometer 2018: http://cms.edelman.com/sites/default/files/2018-02/2018_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report_FEB.pdf

Tabel 16. Lampiran Laporan Realisasi Keuangan 2017

No.	Unit Kerja	Pagu	Realisasi S/D 31 Desember 2017		Sisa Dana S/D 31 Desember 2017	
			Rupiah	%	Rupiah	%
	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik					
1.	Direktorat Komunikasi Publik	14,419,125,000	13,730,076,735	95.22	689,048,265	4.78
2.	Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi	82,240,590,000	78,655,337,308	95.64	3,585,252,692	4.36
3.	Direktorat Pengelolaan Media Publik	73,839,351,000	63,969,269,326	86.63	9,870,081,674	13.37
4.	Direktorat Kemitraan Komunikasi	48,780,950,000	48,374,883,462	99.17	406,066,538	0.83
5.	Direktorat Layanan Informasi Internasional	29,329,710,000	24,479,354,538	83.46	4,850,355,462	16.54
6.	Sekretariat Direktorat Jenderal IKP	140,759,448,000	130,547,309,884	92.74	10,212,138,116	7.26
	JUMLAH DITJEN IKP	389,369,174,000	359,756,231,253	92.39	29,612,942,747	7.61

LAMPIRAN HASIL SURVEI ONLINE AKSES INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH



Survey Online

KOMINFO

**Ikutilah survey
Akses Informasi Publik
tentang Kebijakan dan
Program Prioritas
Pemerintah**

Caranya **mudah** !

- Buka **Link** Berikut !
<http://s.id/surveikp>
- Isi **sembilan pertanyaan** survey
- Cantumkan alamat **e-mail** valid anda

Survey berlangsung sampai dengan **30 Januari 2018**

Tersedia **Tiga buah smartphone** untuk tiga responden yang beruntung

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Sumber Ilustrasi: freepik.com

Latar Belakang

- Akses Informasi Publik tentang Kebijakan dan Program
Prioritas Pemerintah perlu ditakar sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan komunikasi publik pemerintah
- Survei ditujukan untuk mengidentifikasi informasi dan kebijakan pemerintah yang diketahui publik dan saluran komunikasi yang digunakan untuk mengakses informasi tersebut di kalangan pengguna media sosial @kemkominfo dan @DJKP
- Selain itu survei diharapkan dapat menakar kepuasan atas layanan informasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Infomatika
- Hasil survei diharapkan dapat menjadi potret kondisi terkini, bahan evaluasi dan pengembangan program komunikasi publik pemerintah ke depan.

Kerangka Konsep

Survey Online ini menggunakan konsep mengenai akses informasi dan pengetahuan (Notoatmodjo, 2003). Selain itu digunakan pula konsep kualitas informasi (O'Brien, 2002) dan Dimensi Konten (Whitten dan Bentley, 2007). Untuk aspek kepuasan layanan informasi konsep yang diadopsi dari LibQUAL + (Association of Research Libraries, 2000). Semua konsep tersebut di atas digunakan sebagai dasar pengembangan indikator dan pertanyaan survey online yang dilaksanakan.



Indikator

Dalam survei ini digunakan tiga kelompok indikator, yaitu

- Kelompok indikator PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN yang diarahkan untuk menakar terpaan, ingatan, penjelasan kembali atas informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah
- Kelompok indikator KUALITAS INFORMASI yang mencakup aspek akurasi, ketepatan waktu, relevansi kemanfaatan dan kemudahan untuk dipahami dan diperoleh.
- Kelompok indikator SALURAN KOMUNIKASI yang mencakup ragam saluran dan ketepatan waktu penyampaian

Selain itu untuk mengukur tingkat kepuasan layanan digunakan kerangka pikir LibQUAL+ yang mencakup kontrol informasi, dampak layanan dan dampak kelembagaan.

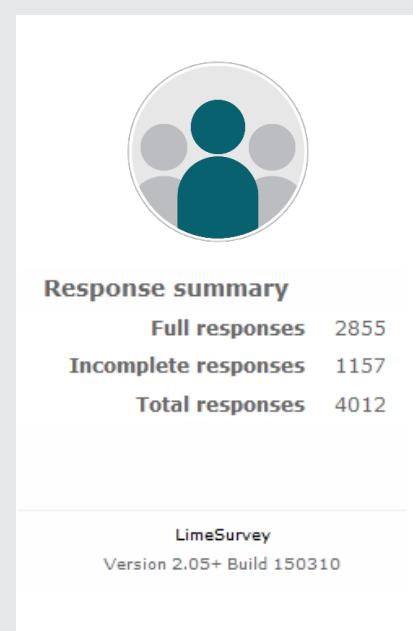
INDIKATOR SURVEI selaras IKU DIRJEN IKP

- Persentase (%) masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah;
- Persentase (%) konten informasi publik tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah yang disampaikan, berkualitas baik
- Persentase (%) Pemanfaatan Saluran Komunikasi dalam rangka Penyampaian Informasi Publik tentang kebijakan pemerintah disampaikan secara cepat dan tepat

Metode

Survei dilakukan secara online, ditargetkan kepada responden yang dipilih purposive dengan memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- Memiliki akses internet, media sosial (twitter, facebook, dan instagram) (Wright, 2005).
- Bersedia mengisi kuesioner yang disediakan
- Kegiatan berlangsung mulai pada 30 Desember 2017 dan berakhir pada 30 Januari 2018.
- Jumlah populasi pengikut/penyuka laman media sosial Kominfo dan DJIKP total 921.877 orang, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin error 2. Sampel survey yang dibutuhkan sebanyak 2.395 orang responen.
- Dalam survey ini didapatkan total sampel 2.855 orang responden yang dapat diolah.



Pengolahan dan Analisis

- Data diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif dan disajikan berdasarkan jawaban lengkap dalam bentuk grafik persentase atas setiap jawaban responden
- Analisis kualitatif dilakukan untuk memberikan konteks dan penjelasan atas jawaban responden
- Pada bagian akhir dilakukan identifikasi data dasar (baseline) perumusan indeks akses informasi berdasarkan jawaban responden sesuai dengan pembobotan sebagaimana tabel disamping:

Tabel 1. Pembobotan Aspek Akses Informasi

ASPEK	BOBOT
Saluran Komunikasi	25
Pengetahuan	15
Kualitas Informasi	25
Kepuasan Layanan Informasi	30
Ekspektasi	5

Temuan-Temuan Penting

- Survei online ini diikuti oleh follower atau penyuka Laman FB Kominfo dan Ditjen IKP; akun twitter “@kemkominfo” dan “@djikp” dan akun instagram “@kemenkominfo” dan “@djikp”
- Secara keseluruhan ada kecenderungan respons beragam, namun demikian sesuai dengan latar belakang responden pengguna media sosial dan online, ada kecenderungan dominan merespons hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas penyebaran informasi publik tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah di dunia online.
- Dari asal responden cenderung variatif, berdasarkan identifikasi IP Adress, sebaran mulai dari Sumatera Utara, sampai ke Sulawesi Utara. Meski dominan responden dari DKI Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya.

Profil Responden



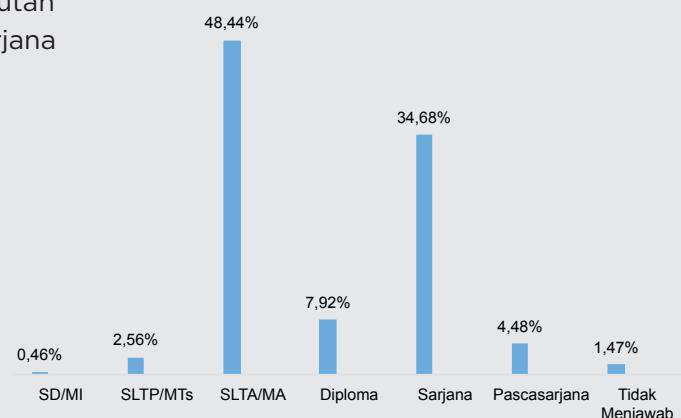
Apakah pendidikan terakhir Bapak/Ibu/Saudara/i?

Dari 2855 responden, sebanyak 1383 orang memiliki latar belakang pendidikan SLTA/MA, pada urutan kedua pendidikan akhirnya sarjana (990) orang.



n= 2.855

Latar Belakang Pendidikan



Akses Terhadap Informasi Publik Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah



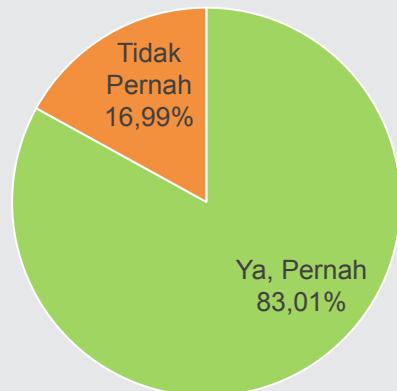
Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah mendapatkan informasi dari lembaga pemerintah selama tahun 2017?

Dari 2855 responden, sebanyak 83,01% menyatakan pernah menerima dan mengakses informasi publik mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah.

Hanya 16,99% yang tidak pernah menerima atau mengakses informasi publik.



n= 2.855



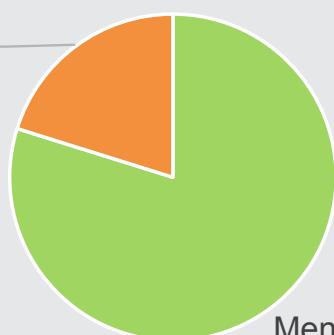
Jenis Informasi yang Pernah Didapatkan



Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah mendapatkan informasi dari lembaga pemerintah selama tahun 2017?

Dari 2855 responden, sebanyak 79,82% bias memerinci tentang informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah. Hanya 20,18% yang tidak bisa memerinci karena sulit membedakan informasi dari media online/berita dan dari pemerintah (Kementerian Kominfo/DJIKP).

Tidak
Menjawab
20,18%



n= 2.855

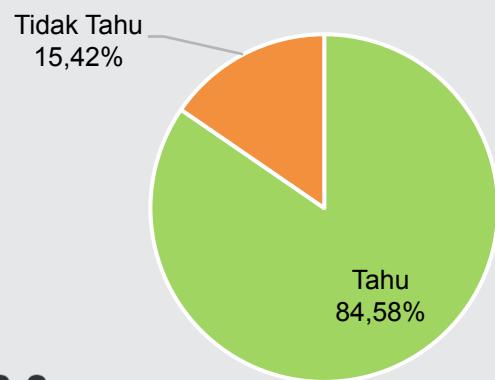
Pengetahuan Kebijakan dan Program Pemerintah



Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i mengetahui tentang kebijakan dan program pemerintah selama tahun 2017?

Dari 2855 responden, sebanyak 84,58% menyatakan mengetahui informasi mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah.

Hanya 15,42% yang tidak pernah menerima atau mengetahui informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah. Adapun secara detil sebaran aspek pengetahuan terdapat dalam grafik disamping...



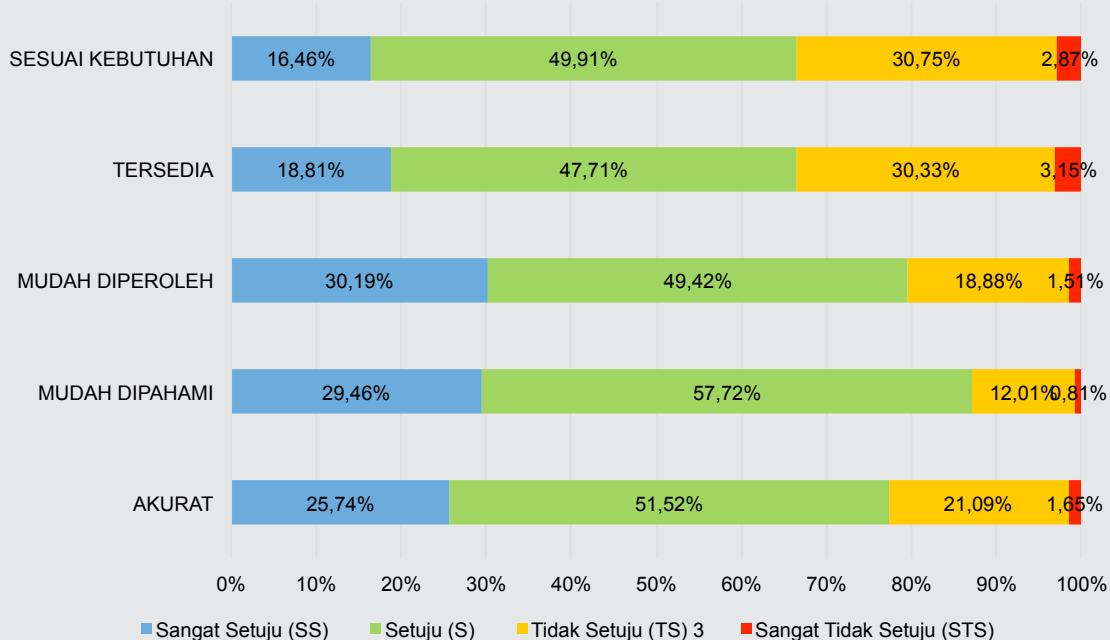
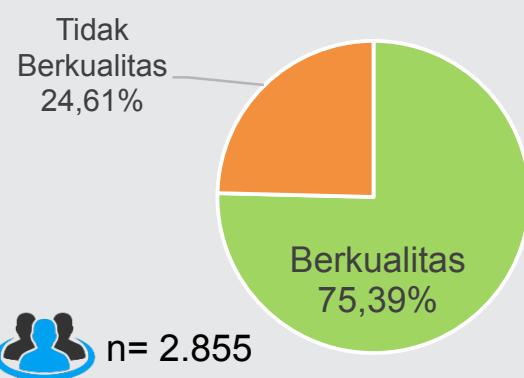
Konten Informasi (Kualitas Baik, Cepat, Tepat)



Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i pernah, bagaimana aspek kualitas informasi mengenai kebijakan atau program kerja pemerintah?

Dari penilaian secara umum, sebanyak 75,39% dari 2855 responden menyatakan konten informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah yang disajikan berkualitas.

Hanya 24,61% yang tidak pernah menerima atau mengakses informasi publik.

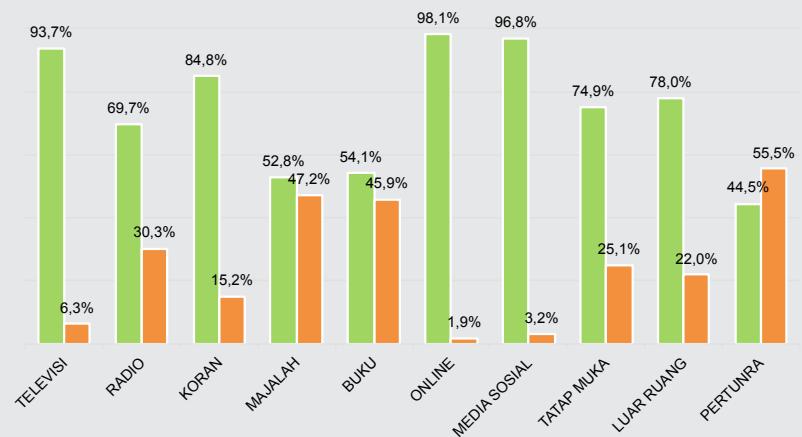


Akses Publik Terhadap Saluran Komunikasi Kebijakan Pemerintah



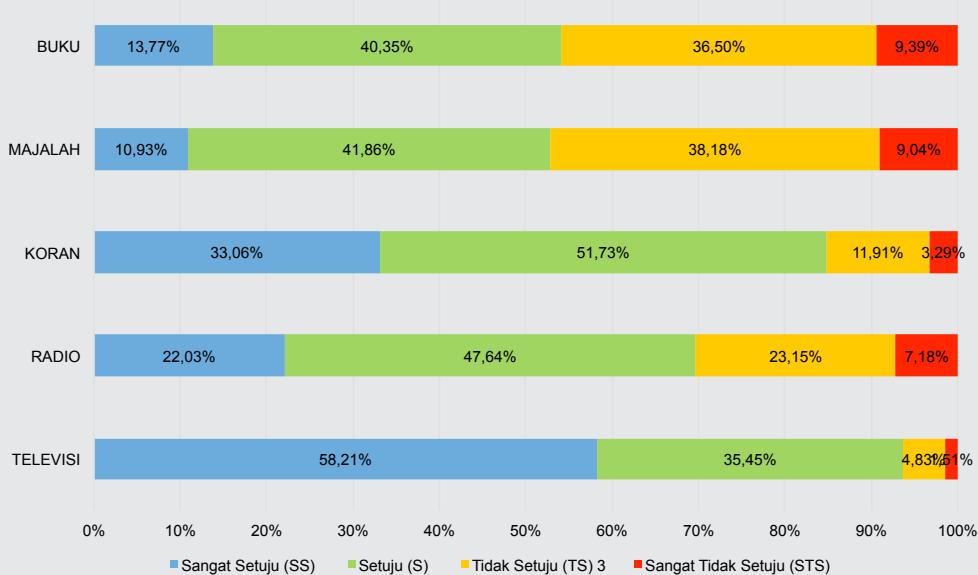
Sumber media massa atau saluran informasi mengenai kebijakan atau program kerja pemerintah yang digunakan Bapak/Ibu/Saudara/i selama tahun 2017?

Dari 2855 responden, dominan mengakses media online 98,11%, media sosial (96,81) dan televisi (93,66%). Total 25,6% yang tidak pernah mengakses saluran komunikasi kebijakan dan program prioritas pemerintah



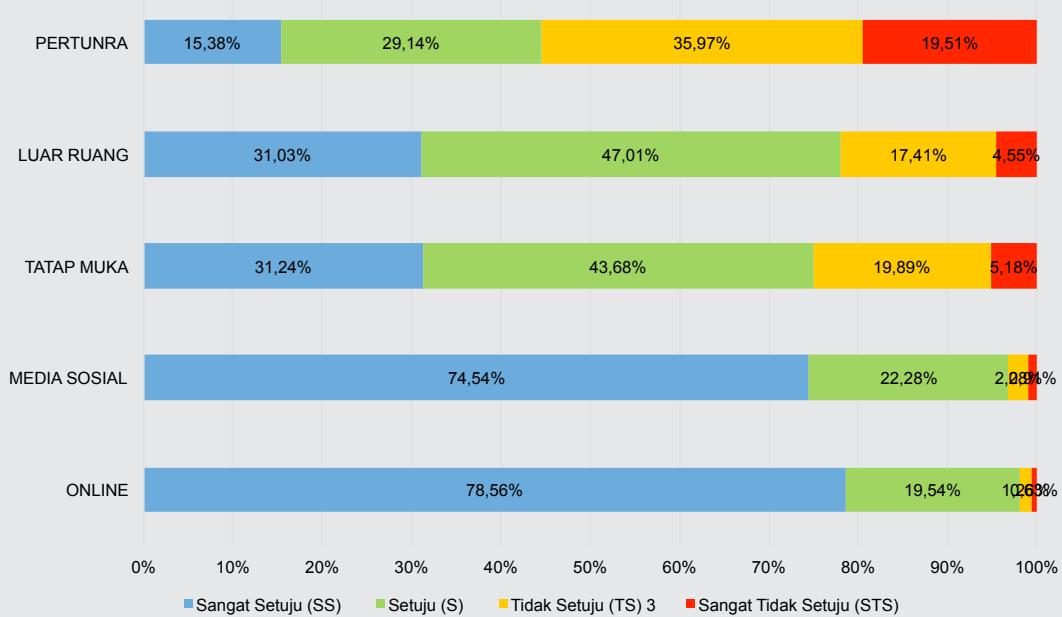
Dari kelompok media tercetak dan elektronik, media televisi dan koran masih dominan digunakan oleh responden untuk mengakses informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah

 n= 2.855



- Media online dalam bentuk website atau portal dominan digunakan untuk mengakses informasi publik
- Adapun media interaktif dan below the line yang banyak digunakan responden mengetahui informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah adalah media tatap muka/dialog interaktif

 n= 2.855



Kepuasan Layanan Informasi



Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i bagaimana kepuasan atas layanan informasi kebijakan atau program kerja pemerintah selama tahun 2017?

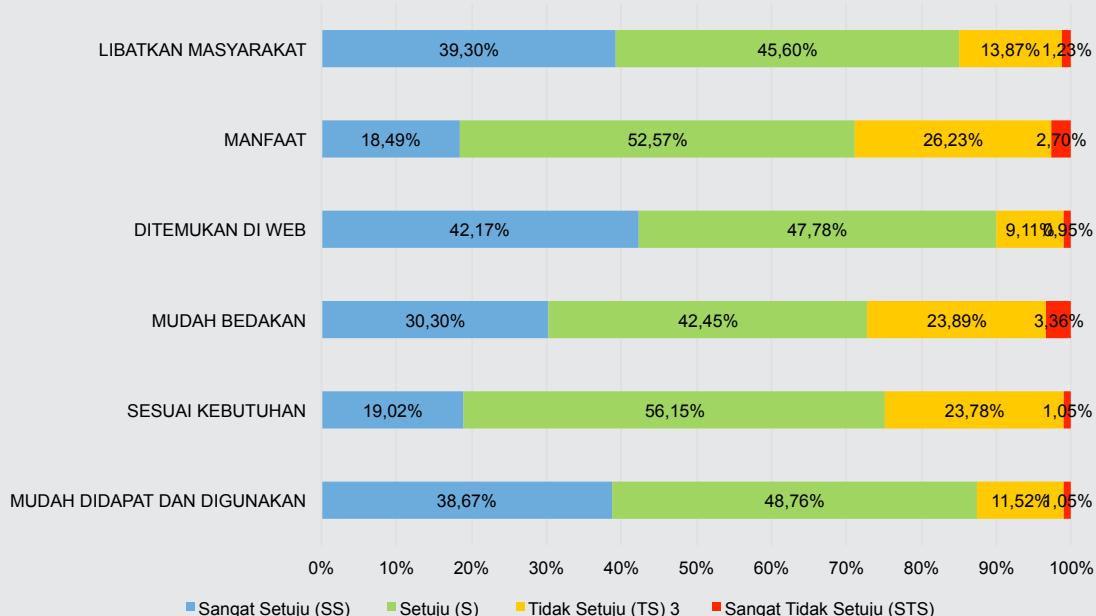
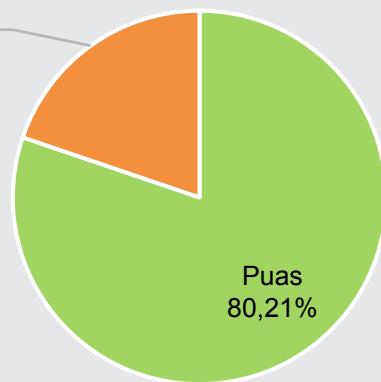
Dari 2855 responden, sebanyak 80,21% menyatakan puas atas layanan informasi mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah.

Hanya 19,79% yang tidak puas atas informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah.

n= 2.855

Tidak Puas
19,79%

Puas
80,21%



Dari 2855 responden, sebanyak 83% menyatakan pernah menerima dan mengakses informasi publik mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah.

Hanya 17% yang tidak pernah menerima atau mengakses informasi publik.

Simpulan

- Dari 2855 responden, sebanyak 83,01% menyatakan pernah menerima dan mengakses informasi publik mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah. Hanya 16,99% yang tidak pernah menerima atau mengakses informasi publik.
- Sebanyak 79,82% bisa memerinci informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah dan hanya 20,18% yang tidak bisa memerinci karena sulit membedakan informasi dari media online/berita dan dari pemerintah (Kementerian Kominfo/DJIKP).
- Dari penilaian secara umum, sebanyak 75,39% dari 2855 responden menyatakan konten informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah yang disajikan berkualitas. Hanya 24,61% yang tidak pernah menerima atau mengakses informasi publik.
- Dari 2855 responden, dominan mengakses media online 98,11%, media sosial (96,81) dan televisi (93,66%). Total 25,6% yang tidak pernah mengakses saluran komunikasi kebijakan dan program prioritas pemerintah.
- Dari 2855 responden, sebanyak 83% menyatakan pernah menerima dan mengakses informasi publik mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah. Hanya 17% yang tidak pernah menerima atau mengakses informasi publik.

Referensi

- Association of Research Libraries. 2000. LibQUAL+ Washington.
- O'Brien, James A. dan Marakas, George M. 2011. Management Information Systems, 10th Edition". McGraw-Hill/ Irwin, New York
- Kim, Young. 2015. Toward an effective government-public relationship: Organization-public relationship based on a synthetic approach to public segmentation dalam Public Relations Review 41 (2015) 456-460
- LimeSurvey Project Team /Carsten Schmitz . 2012. LimeSurvey: An Open Source survey tool. LimeSurvey Project Hamburg,
- Germany. URL <http://www.LimeSurvey.org>
- Whitten, Jeffrey L. dan Lonnie D. Bentley. 2007. Systems analysis & design methods. New York: McGraw-Hill/Irwin



**Inilah responden yang beruntung dalam
Survey Akses Informasi Publik tentang
Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah**

-  *susant*****@gmail.com*
-  *Ilmia*****@gmail.com*
-  *s.rahay*****@yahoo.com*

Responden yang beruntung akan dihubungi
melalui email untuk proses pengiriman ponsel

Terimakasih 

kepada masyarakat yang telah
berpartisipasi mengisi Survey Akses Informasi Publik
tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Sumber Ilustrasi: freepik.com

